ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 9, Nomor 3, Oktober 2020: 299 - 312
DOI: 10.33772/etnoreflika.v9i3.889
ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

PERTAMBANGAN NIKEL DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Fenomenologi di Kabupaten Konawe Selatan)

NICKEL MINING AND ITS PROBLEMS (A Phenomenological Study in South Konawe Regency)

Peribadi[1], Syaifudin Suhri Kasim[2], Juhaepa[3], Sarmadan[4], Samsul[5] dan La Ode Montasir[6]

[1,2,3,4,6]Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232, Indonesia
[5]Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo
[1]Email korespondensi: citaperibadi@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini merupakan bentuk studi "*before and after*" atas keberadaan industrialisasi pertambangan nikel dengan berbagai problematikanya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Pendekatan kualitatif dalam konteks *Phenomenologi* digunakan sebagai upaya mengembangkan telaah-telaah kritis reflektif atas berbagai fenomena, realitas dan hiperealitas yang mengemuka melalui instrumen pengamatan, wawancara mendalam (*deep interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika alam pedesaan kita di masa lalu diibaratkan sebagai seorang gadis cantik yang demikian indah dan elok dipandang mata. Kini, alam pedesaan itu tampak tak mempesona lagi, karena satwa-satwa sebagai suatu realitas ekosistem yang alamiah telah digantikan oleh satwa-satwa baru, berupa peralatan raksasa penumbang pepohonan, penggali dan pengangkut tanah nikel serta mobil-mobil karyawan perusahaan yang lalulang seolah tak pernah berhenti dan tak kenal lelah dengan ekosistem khasnya tersendiri.

Kata kunci: pertambangan, problematika dan solusi alternatif

ABSTRACT

This study is a form of "before and after" study on the presence of nickel mining industrialization with its various problems in the area of South Konawe Regency. A qualitative approach in the context of the Phenomenology is used as an effort to develop reflective critical studies on various phenomena, realities and hyper realities through observation instruments, deep interviews and Focus Group Discussions. The results of study shows that if the rural nature in the past was like a beautiful girl that is nicely seen, now it no longer seems to be enchanting, because the animals as a natural ecosystem reality have been replaced by mechinaries as a new form of "animals", such as the giant equipment eradicating trees, digs and hauls nickel ore, as well as by the Company employees' cars apparently never stopping and tiredless with their own unique ecosystem.

Keywords*: mining, problematics and alternative solution*

PENDAHULUAN

Manusia dalam menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupan sosialnya adalah didasari oleh etos dan pandangan hidupnya masing-masing. Bagi manusia yang berada di belahan dunia bagian Timur, pada umumnya filosofi kehidupan mereka terintergral dengan alam sekitarnya. Karena itu, upaya memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya sehari-hari, sejak awal mereka memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di lingkungannya dengan cara berladang, bercocok tanam, memburuh binatang-bintang liar, menangkap ikan di rawa-rawa dan sungai, hingga bergeser ke pantai dan di tengah lautan. Mungkin saja atas dasar aktivitas yang sangat sederhana itu, sehingga orang pun mengatakan bahwa "pertanian adalah peradaban vital manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini".

Sepanjang masa, manusia dengan etos kerja dan pandangan hidupnya telah memanfaatkan SDA secara subsistensi dengan penggunaan peralatan tradisional yang amat sederhana, sehingga tingkat produksinya pun sangat terbatas untuk sekedar memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya pada hari itu. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya di hari esok, maka mereka pun kembali ke alam untuk mengambil secukupnya. Karena itu, individu dan masyarakat yang bertempat tinggal pada suatu bangsa dan negara yang kaya raya dengan SDA seperti kekayaan alam Bangsa Indonesia yang terbentang bagai zamrut katulistiwa, maka sudah pasti mereka dapat menyelenggarakan kehidupan sosial ekonomi dengan menyenangkan.

Sebaliknya, bagi anak manusia yang berdomisili di lingkungan yang sumber daya alamnya kurang mampu mencukupi kebutuhan primer penghuninya, maka dapat dipastikan bahwa penduduk lokal di wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari. Meskipun kenyataanya tidak mutlak demikian, karena ada bangsa dan negara seperti Jepang yang miskin dengan sumber daya alam, tetapi justru kaya dalam konteks Sumber Daya Manusia (SDM).

Potensi Sumber Daya Alam yang terhampar mengarabiru dari Sabang sampai ke Marauke dengan aneka potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya, sesungguhnya memberi peluang kepada penghuni sebuah bangsa dan daerah untuk tumbuh dan berkembang pesat dengan berbagai implikasi sosialnya. Tak pelak lagi, ketika mulai memasuki dunia industrialisasi, maka proses pemanfaatan SDA kita mulai berlangsung maju dengan penggunaan teknologi pertanian yang modern dan tepat guna, sehingga tingkat produksi yang dicapai tidak lagi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer anggota rumah tangga sehari-hari. Akan tetapi, sudah dipertukarkan dan bahkan sebagian besar sudah dipasarkan ke berbagai penjuru. Dalam konteks ini, mulai terjadi pergeseran orientasi dari upaya produksi berbasis pemenuhan kebutuhan anggota rumah tangga sehari-hari kepada upaya produktivitas yang berorientasi marketing.

Sejak tahun 70-an Bangsa Indonesia telah melangsungkan proses industrialisasi pertanian secara besar-besaran, sehingga program industrialisasi pertanian tersebut membuahkan sebuah prestasi "swasembada pangan" yang sangat spektakuler pada kurun waktu Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto ketika itu. Namun dalam konteks ini, berbagai pandangan ahli yang mengemuka ketika mulai menyoal implikasi sosial ekonomi atas keberadaan sebuah program "Revolusi Hijau" dengan berbagai perangkat keras dan lunaknya. Betapa tidak, prahara alih fungsi tanah dari dunia agraris ke dunia industri tampak berlingsung dengan gegap gempita. Tak pelak lagi, prahara sosial lingkungan yang

merebak sebagai akibat dari industri pertambangan, adalah tidak hanya berlangsung dalam bentuk kerawanan ekosistem dan malapetaka yang terjadi di sekitar wilayah indutri pertambangan itu. Akan tetapi, justru prahara sosial yang mungkin tak terbanyangkan selama ini adalah berlangsungnya sebuah proses degenerasi manusia tani yang kini mulai tampak fenomenal, sehingga hampir tidak ada lagi anak petani yang mau menjadi petani untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Pasalnya, hampir semuanya mereka mulai tergiur untuk mencari sesuap nasi di wilayah industri pertambangan dan di perusahan lainnya.

Sementara itu, di sekitar wilayah pertambangan seperti Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan sebagai sampel pengumpulan data selama penelitian berlangsung, adalah tidak hanya membuat warga masyarakat mulai kehilangan kenyamanan hidup sehari-hari, karena perkampungannya sudah dikelilingi dan diselimuti oleh deru-debu mesin penggali dan pengangkut tanah nikel. Akan tetapi, menurut Piliang (1998) juga mulai lenyap satwa-satwa sebagai suatu realitas ekosistem dan telah digantikan oleh satwa-satwa baru berupa peralatan raksasa penumbang pepohonan, penggali dan pengangkut tanah nikel dengan ekosistem khasnya tersendiri. Lebih dari itu, kita pun telah kehilangan rasa bersatu dengan alam semesta itu.

Ironisnya, menurut Peribadi (2016) bahwa para daerah dan lokal cenderung tidak peduli dengan kodisi kesunyian dan satwa-satwa baru tersebut. Hampir saja seluruhnya terhipnotis dan terlena oleh materi yang berpacu seperti balapan mobil yang mendering dengan kecepatan tinggi, sehingga pemusnahan hutan belantara terus-menerus berlangsung secara spektakuler. Pada akhirnya, prahara seperti kebakaran dan asap tebal menjadi titik kulminasi dari penghancuran atau pemusnahan tersebut. Karena itu, mungkin saja ada kata yang terasa kurang indah didengar dan terasa mencemaskan bahwa ”sesungguhnya eksploitasi hutan belantara dan pegunungan meru bom waktu yang cukup misterius, sehingga cepat atau lambat akan membombardemen penghuni bumi pertambangan dan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam konteks studi fenomenologi yang bernaung di bawah payung paradigma konstruktivisme. Paradigma ini berpandangan bahwa realitas itu tidak bersifat tunggal dan terbentuk karena diciptakan oleh individu berdasarkan hasil interpretasi mereka terhadap lingkungannya. Karena itu, paradigma konstruktivisme sangat berguna untuk menemukan makna dari sebuah peristiwa atau kegiatan dengan menggunakan beragam metode (Muhadjir, 2011).

Seiring dengan itu, maka menurut Moleong (2013) bahwa fenomenologi kadang-kadang digunakan sebagai perspektif filosofi dan juga digunakan sebagai pendekatan kualitatif dalam mengembangkan penelitian ilmu-ilmu sosial. Sedangkan menurut Morissan (2019) bahwa fenemenologi sebagai sebuah metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya dengan tidak memanipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Dengan demikian, kajian atas keberadaan industri pertambangan nikel dengan berbagai problematikanya dapat dipahami secara holistik dan komprehensif. Adapun data yang telah diperoleh dengan metode obervasi partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta FGD, dianalisis dengan proses *Interpretative Phenomenological Analysis* melalui beberapa tahapan ((Hajaroh, dalam Peribadi, 2019) dan hasil kajiannya diuraikan secara kritis reflektif seperti terurai pada pembahasan berikut ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambangan Nikel: Perspektif Eksploitasi Kapitaslisme Agraris

Dalam konteks kepemilikan tanah atau lahan perkebunan dan pertanian, seolah kita tidak asing lagi dengan keberadaan manusia tani yang tergolong sebagai "petani yang kenyang tanah dan petani yang lapar tanah", sehingga kondisi ini mengarah pada ketimpangan dalam hal penguasaan tanah dan struktur kepemilikan yang tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan mereka yang tergolong "tunakisma" cenderung bergantung (*dependent*) dan juga seakan-akan menjadi budak kepada mereka yang menjadi pelaku eksploitasi kapiralisme agraris (Salman, 2012).

Ketika nafsu eksploitasi dan birahi eksplorasi agraris yang diperagakan oleh kaum kapitalis domestik dan manca-negara tersebut disorot dari perspektif teori ketergantungan, strkturalisme semi otonom dan neo klasik (Salman, 1996), maka tampak persepsi yang berbeda terhadap konstalasi hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam perspektif teori ketergantungan, maka dapat ditandaskan bahwa bagi negara-negara yang berada di belahan dunia ketiga adalah diposisikan sebagai negara pinggiran, sehingga potret kepemimpinannya diklaim sebagai "kelas komparador kapitalisme internasional" yang harus merumuskan kebijakan pembangunannya sesuai dengan selera kaum kapitalis internasional. Karena itu, teori ketergantungan merekomendasikan bahwa jika negara berkembang di dunia ketiga ingin merdeka dan mandiri dalam menentukan kebijakan pembangunan, maka harus memutuskan hubungan dengan kaum kapitalis internasional.

Kini, konstalasi ketidaseimbangan hubungan antar negara dimaksud itu, tampak nyata dan tengah berlangsung antara bangsa Indonesia dengan China. Meskipun dalam perspektif teori strukturalis semi otonom bahwa konstalasi hubungan seperti itu dipersepsikan negara berperan sebagai penengah konflik antara berbagai kelompok kepentingan yang bergesekan serta negara diposisikan sebagai lembaga politik yang lebih otonom untuk menengahi konflik antara kapital asing, kapital domestik, dan warga masyarakat. Sedangkan dalam perspektif teori neo klasik, negara diposisikan sebagai pengambil keputusan ekonomi politik yang selalu bersandar pada pertimbangan dan pilihan mekanisme pasar yang rasional serta pendayagunaan ekonomi nasional untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, maka kebijakan ekonomi diputuskan berdasarkan pengaruh faktor teknologi, penduduk, pasar dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, bagaimana jika ketiga perspektif teoritis tersebut ditampilkan untuk menyorot konstalasi hubungan antara Indonesia sebagai negara berkembang dengan negara-negara kapitalis sebagai negara maju? Apakah benar menurut Salman (1996) bahwa teori struktural semi otonom lebih relevan dalam melihat hubungan negara dan petani di era Orde Baru dengan pertimbangan bahwa teori ini memperlihatkan latar belakang historis hubungan negara dan masyarakat. Selain itu, teori ini memberi ruang bagi konflik dalam eksistensi negara ketika negara memperkuat kekuasaannya melalui upaya menengahi konflik antar berbagai kelompok serta teori ini memperhatikan secara mendalam dinamika hubungan yang saling mempengaruhi antara pemerintah dan masyarakat ?

Menurut hemat penulis bahwa perspektif teori ketergantungan lebih relevan dan lebih kontekstual jika dibanding dengan teori strukturalis semi otonom dan teori neo klasik untuk mengkaji konstalasi hubungan antar bangsa-bangsa, terutama antara bangsa kapitalis dengan Indonesia kini. Betapa tidak, bangsa

yang kaya raya dengan SDA yang sangat sulit ditandingi oleh kekayaan SDA negara lain itu, tetapi bangsa Indonesia yang penuh intan berlian ini tersungkur dan terpelanting menjadi negara *under-development* alias terbelakang dan miskin papa.

Betapa kenyataan pahit ini telah menunjukkan bahwa selain kekayaan alam tersebut terus dieksploitasi dan dieksplorasi dengan nafsu angkara-murkah oleh sang aktor kapitalis mancanegara dan domestik sebagai *agent*-nya, juga power negara terhadap kekayaan alam kita sendiri, pun kian tampak mengalami degradasi penguasaan, meskipun ikhwal penguasaan itu adalah sesungguhnya dijamin oleh konstitusi. Jika demikian, pantaslah jika prahara dan bencana alam terus membombardemen ibu pertiwi dan telah menggelegar di beberapa persada nusantara tercinta ini. Entah gelombang bencana dan malapetaka apalagi yang yang bakal menghempas ibu pertiwi tercinta ini?. Besar harapan agar kaum *elite* sosial yang dimanahi tugas dan peran serta tanggung jawab kenegaraan dan pemerintahan, secepat mungkin menyadari bencana alam dan aneka jenis gempa lainnya !

Sungguh, juga harus diakui bahwa proses kegiatan industri pertambangan telah memberikan dampak positif kepada kas negara dari pajak dan royalti. Namun jika dibanding dengan dampak negatifnya dalam bentuk pencemaran lingkungan serta pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang berakibat pada kemiskinan pada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan industri pertambangan belum dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat, karena keuntungan pemerintah dari kegiatan tersebut hanya sedikit dibandingkan dengan biaya sosial lainnya. Tak pelak lagi, selama gegap gempita program industrialisasi dicanangkan oleh Pemerintah telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya dan organisasi-organisasi sosial pedesaan, sehingga pranata sosial yang merupakan mutiara perdesaan pun mengalami degradasi secara massif.

Pertambangan Nikel dan Problematikanya

Tampaknya, di balik gegap gempita industrialisasi yang mengemuka selama penggunaan *paradigma developmentalisme*, memang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup mencengangkan. Namun di balik gemerlapan industrialisasi tersebut, juga menyisakan sejumlah problematika sosial yang cukup menegangkan. Dalam konteks ini, mengemuka potret fenomenal kesenjangan dan diskriminasi sosial, konflik sosial, deforestase dan degradasi lingkungan serta masalah demografis yang terus berlangsung seiring dengan potret dekulturasi, despritualisasi dan dehumanisasi serta demoralisasi di tengah kehidupan sosial kebangsaan ini. Adapun yang secara khusus telah terjadi di wilayah pertambangan nikel Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, terlihat pada konteks degradasi lingkungan, konflik sosial, dan beberapa kenyataan pahit lainnya yang terurai pada pembahasan berikut ini.

Pertambangan dan Degradasi Lingkungan

Telah disebutkan terdahulu bahwa keberadaan sebuah industri pertambangan nikel di suatu daerah, sudah pasti berdampak positif dan negatif. Demikian halnya indutrsi pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Kecamatan Palangga serta Palangga Selatan yang tidak hanya menunjukkan dampak positif bagi pemilik tanah di kawasan pertambangan. Akan tetapi, sebaliknya juga berdampak negatif dalam bentuk kerawanan ekosistem dan kerusakan lingkungan yang disebabkan

oleh kegiatan eksploitasi dan eksplorasi beberapa perusahaan tambang nikel tersebut, yakni: (a) Jalanan dalam kondisi rusak, berdebu dan berlubang; (b) padi di sawah dan tanaman lain menjadi kerdil dan mati karena keringnya sumber mata air sudah; (c) Kebisingan atau polusi suara; (d) Rumput laut mati yang menyebabkan Petani merugi; dan (e) Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, seperti petani rumput laut dan petani sawah. Kondisi tersebut dialami oleh 200 KK petani rumput laut di Desa Lakara Pantai Kecamatan Palangga Selatan. Mereka terpaksa kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena dampak aktivitas eksploitasi tersebur (Peribadi, dkk, 2013).

Menurut pengakuan warga masyarakat sebagai petani rumput laut di Desa Lakara Pantai Kecamatan Palangga Selatan bahwa di masa lalu mereka selalu panen rumput laut dua kali dalam sebulan sebelum beroperasinya perusahaan tambang di wilayah Kecamatan Palangga Selatan. Bisa dibayangkan bahwa sekali panen dapat menghasilkan 10 juta rupiah per Kepala Keluarga. Dengan demikian berarti setiap KK memperoleh sebanyak 20 juta per bulan. Akan tetapi, selama perusahaan tambang itu beroperasi di desanya, maka mereka hanya mampu mendapatkan sebanyak 2 juta rupiah. Hal ini terjadi, karena usaha rumput laut yang ditekuninya selama ini tidak bisa lagi tumbuh dan berkembang dengan subur akibat dari kepulan debu dari arah perusahaan tambang nikel.

Memang perusahaan tambang nikel itu telah melakukan proses ganti rugi, namun pemberian uang kompensasi itu adalah tidak seimbang dengan penghasilan dan keuntungan yang pernah mereka dapatkan dari usaha rumput laut setiap bulan sewaktu industri tambang itu belum beroperasi di perkampungannya. Betapa mencengangkan, karena ditemukan sebanyak 200 KK petani rumput laut yang dilibas dan dikorbankan oleh operasionalisasi perusahaan tambang tersebut. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka cepat atau lambat sudah mengancam dan membahayakan kehidupan generasi mendatang di wilayah perdesaan itu.

Pertambangan Nikel dan Fenomena Konflik Sosial

Menurut Fisher, dkk., (2001) bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih sebagai individu atau kelompok yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Atau dapat pula dipahami sebagai hasil interaksi antara tujuan dari dua pihak atau lebih dalam situasi persaingan (Oberschall dalam Koodoh dkk, 2018). Namun demikian, konflik merupakan sebuah realitas kehidupan yang tidak mampu dihindari dan tidak bisa terhindarkan, terutama ketika tujuan masyarakat tidak sejalan serta mengalami ketidakseimbangan dalam proses hubungan sosial. Contohnya adalah kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta kekuasaan yang juga tidak seimbang. Hal itu kemudian menimbulkan aneka problematika sosial seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kajahatan. Semuanya saling berkaitan yang kemudian membentuk mata rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang mengarah ke ranah konstruktif maupun destruktif.

Tampaknya, keberadaan sebuah industri pertambangan dengan berbagai implikasi sosialnya adalah sangat relevan dikaji dari sudut pandang teori konflik. Dalam konteks ini, Karl Marx memandang masyarakat terdiri atas dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi (*property*) sebagai kaum borjuis dan kaum proletariat. Kelas borjuis adalah kelompok yang

memiliki sarana dan alat produksi berupa sebuah perusahaan atau berupa industri pertambangan yang merupakan instrument untuk mengembangkan dan menguasai sumber daya. Sebaliknya, kelas proletariat merupakan kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi, sehingga dalam upaya pemenuhan berbagai jenis kebutuhannya, terutama kebutuhan ekonomi keluarganya adalah dengan terpaksa harus menjual tenaganya (Johnson 1986, Wirawan, 2012, Ritzer, 2013).

Tak pelak lagi, dalam perspektif strukturalis dan kulturalis kian dapat mempertajam kajian, karena melihat pada dua sisi sebagai faktor penentu. Dalam tinjauan struktural, menurut Scott (1981) bahwa dinamika sosial dan perubahan budaya dipengaruhi oleh kerawanan struktural, kerawanan ekologis dan kerawanan monokultur. Sedangkan dalam perspektif kultural, maka menurut Kurasawa (1993) sebagai penganut Weberian bahwa faktor-faktor sosio-kultural dapat berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan ketegangan yang terjadi akibat bekerjanya faktor-faktor struktural dimaksud Scott. Misalnya, ketika kerawanan struktural tersebut dikaitkan dengan orientasi tindakan, maka menurut Weber (2012) akan terlihat adanya pengalihan tindakan seseorang atau sekelompok orang dari basis tindakan tradisional ke ranah tindakan rasional. Pada gilirannya, akibat dari kerawanan struktural (Baca: kebohongan struktural) sebagai pemicu merebaknya kerawanan ekologis berupa ketidakpastian musim, banjir, longsor, hama lalat dan aneka jenis penyakit yang mendebarkan, dapat menjadi pemicu konflik yang sangat tajam. Ikhwal inilah yang sesungguhnya tengah terjadi dan menimpah warga masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadi pemicu konflik sosial. Tak pelak lagi, ketika dilumuri oleh gerombolan TKA sebagai sumber penebar virus idiologi komunis serta virus *pandemic* yang kini belum jelas tempo berakhirnya.

Upaya mengantisipasi sumber permasalahan konflik yang terselubung dan terang-terangan di lapangan adalah menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, terutama dari kalangan koorporasi dalam mengeksploitasi SDA di wilayah pertambangan. Dalam konteks ini, persoalan keadilan (*justice*), distribusi hasil dan pemerataan (*equality*), serta keberlanjutan (*sustainability*) harus dikedepankan dalam upaya menghindari terjadinya konflik sosial. Pasalnya, eksistensi perusahaan tambang nikel, seperti : PT. Sambas Minerals Mining di Desa Watudemba Kecamatan Palangga, PT. Macika di Desa Kiaea Kecamatan Palangga, PT. Agung Perkasa di Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Selatan, PT. Hilcon di Desa Koeono Kecamatan Palangga, dan PT. Jagad Raya di Desa Koeono Kecamatan Palangga Selatan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pola interaksi sosial sebagai akibat dari fenomena ketidakmerataan, ketidakadilan, dan ketidakberlanjutan yang mengemuka di tengah warga masyarakat.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi tambang nikel di Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan tampak pihak perusahaan belum memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi masyarakat. Justru sebaliknya, yang terjadi merugikan warga masyarakat lokal dan merusak lingkungan, karena hanya dinikmati oleh pemilik lahan. Sedangkan bagi masyarakat banyak yang tidak memiliki tanah di areal pertambangan, mereka tidak mendapatkan apa-apa, kecuali deru debu yang bertebaran di sekitarnya. Demikian pula, tampak belum tercipta pemerataan (*equality*), karena hasil tambang hanya dinikmati oleh pemilik modal dan segelintir pemilik lahan dan serta oknum pejabat yang ber-

kolaborasi di dalamnya. Sementara warga masyarakat yang kebanyakan tidak memiliki lahan, hanya tampil menjadi penonton yang sabar hingga menelan pil pahit kemiskinannya. Tak pelak lagi, faktor keadilan (*justice*) merupakan masalah yang sangat mendasar, karena pihak pemerintah dan koorporasi cenderung tidak bersikap adil kepada masyarakat.

Betapa tidak, beberapa bantuan dari perusahaan tambang dalam bentuk uang, barang, dan maupun berupa program CSR sebagai strategi *community development* hanya diberikan atau diserahkan kepada 8 (delapan) desa dari puluhan desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan, antara lain: (1) Desa Kiaea; (2) Desa Watudemba; (3) Desa Waturapa; (4) Desa Ulu Lakara; (5) Desa Lakara Pantai; (6) Desa Kiaono; (7) Desa Amondo; dan (8) Desa Watumbohoti. Mengapa hanya kedelapan desa tersebut yang menerima dana CSR dan mengapa desa-desa lainnya belum dimasukkan, serta apa saja yang menjadi indikator kelayakan dan ketidaklayakan atau yang menjadi faktor pertimbangan untuk menerima dan tidak menerima biaya kompensasi dari pihak perusahan tambang itu?

Ketika disorot dari konteks keberlanjutan (*sustainability*), maka tampaknya semakin bermasalah, karena eksplorasi pertambangan nikel tersebut adalah sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah dan tingkat kesuburan tanaman serta persawahan pada warga masyarakat di sekitarnya. Karena itulah, maka proses evaluasi secara periodik terhadap keberadaan perusahaan tambang menjadi penting dilakukan sebagai upaya antisipatif atas dampak negatif yang lebih besar jika dibanding dengan dampak positifnya. Ketika hasil evaluasi menunjukkan dampak negatifnya lebih dominan, maka berarti harus segera dihentikan eksplorasi perusahaan tambang itu. Karena kalau dilanjutkan, maka konsekwensi logisnya adalah bencana ekologis dan malapetaka lingkungan yang sangat mencemaskan. Karena itu dapat ditandaskan bahwa keberadaan dan kehadiran industri pertambangan adalah tidak hanya bermanfaat, tetapi juga membuahkan perpecahan, permusuhan dan konflik dalam masyarakat.

Antara Harapan dan Kenyataan Pahit

Tampaknya, di balik gegap gempita industri pertambangan nikel yang beroperasi di Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan, terdengar letupan-letupan kegembiraan serta rintihan-rintihan tangis yang berkelindang dengan berbagai permasalahannya. Betapa tidak, polarisasi sosial dan munculnya permasalahan sosial lainnya menjadi potret kehidupan sosial ekonomi seperti yang digambarkan dalam bagian sebelumnya.

Pada satu sisi, mereka sangat gembira ketika terdengar kabar bahwa ada potensi kandungan alam yang terkandung di dalam perkampungannya. Sungguh mereka tak pernah membayangkan sebelumnya bahwa wilayah perdesaan yang ditempati sejak dilahirkan hingga dewasa, didalamnya terkandung potensi kekayaan alam yang bakal meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya kelak. Tentu saja hayalan, impian dan harapan yang saling berkelindang dengan semangat yang penuh tersebut dapat dimaklumi, karena areal pertanian yang kurang subur yang selama ini mereka olah dengan ”etika subsisten” adalah bukan hanya tidak dapat menumbuhkan kehidupan sosial ekonominya. Akan tetapi, hasil olahan tanah milik masing-masing penduduk, hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi anggota rumah tangganya. Hal itu pun kerapkali tidak dapat terpenuhi karena faktor kondisi alam yang sewaktu-waktu tidak bersahabat.

Tampaknya, impian atas informasi bahwa di wilayah perkampungannya ditemukan sumber daya alam yang bakal menggenjot kehidupan dan kesejahatraan sosial sosial ekonominya, kini telah menjadi sebuah kenyataan yang benar-benar mereka sangat pantas disyukuri. Betapa tidak, beberapa informan di wilayah pertambangan tersebut yang berhasil ditemui dan diwawancarai terdengar cukup nyaring pandangan dan pengakuan mereka bahwa kehadiran Industri Pertambangan Nikel yang datang mengolah potensi alam di kampungnya telah berhasil meningkatkan kesejahtraan sosial ekonominya. Menurut pengakuan para informan bahwa jika dibandingkan dengan kehidupan mereka di masa lalu sebelum hadirnya Industri Pertambangan Nikel untuk mengelolah potensi alamnya, maka kini daya beli dan upaya pemenuhan kebutuhan sehari-harinya sudah dapat terpenuhi dengan cukup maksimal. Tak pelak lagi, bagi warga masyarakat yang memiliki lokasi di wilayah pertambangan, maka mulai tampak kepemilikan sarana transfortasi seperti roda dua dan roda empat serta perumahan yang sudah tampil indah dan permanen seperti terlihat dalam gambar 1.

Mungkin saja patut disimak dan direnungkan kisah dari sang pemilik rumah permanen tersebut. Adalah seorang perempuan paruh bayah yang bertutur tulus menceritrakan perjalanan kehidupan rumah tangganya. Menurutnya, ketika itu ia tersenyum penuh kegembiraan bercampur rasa kaget atas rezeki nomplok yang dialaminya dan tak pernah diduga sebelumnya. Mengutip sepenggal penuturan dari Ibu Kalao yang memiliki tanah di wilayah pertambangan, sebagai berikut:

> Jika pada selama ini saya hanyalah seorang Ibu rumah tangga yang dulunya sebagai penjual ikan keliling kampung. Namun kini saya hanya duduk manis di rumah baru menunggu rezeki yang datang dari pembagian keuntungan perusahaan dari setiap pengapalan lahan yang biasanya mencapai ± 80 Juta/ pengapalan. Betapa mengagumkan, kini kehidupan Ibu Kalao telah menikmati hidupnya dengan sejumlah investasi mulai dari tabungan gendut, rumah mewah, dan anak-anaknya yang semuanya sudah berhasil, dan bahkan sebentar lagi Ibu Kakao akan menunaikan kewajiban kelima Rukun Islam yang kelima yaitu naik Haji.

Akhirnya ketika rezeki nomplok datang menghampirinya, keluarga Ibu Kalao merasa sangat bersyukur dan bahagia atas semua yang kini dirasakannya. Namun pada sisi lain Ibu Kalao pun menyadari atas keberadaan perusahaan tambang yang mengelolah lahannya itu hanya bersifat sementara saja. Karena itu, Ibu Kalao dan ke 4 anaknya harus pandai-pandai menggunakan rezeki nomplok yang diterimanya dengan berupaya memenuhi kebutuhan keluarganya secara efisien dan efektif (Peribadi, 2016).



Gambar 1 (a)



Gambar 1 (b)

Gambar 1. Potret rumah lama sebelum ada tambang (a); dan rumah baru (setelah ada tambang) Ibu Kalao sebagai salah seorang pemilik lahan di wilayah pertambangan Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan (b)

Sebaliknya, bagi warga masyarakat yang tidak memiliki lahan di sekitar wilayah pertambangan, maka mereka hanya memperoleh uang pelipur larah yang mereka sebut sebagai ”uang debu” sebesar Rp. 500.000,- per kepala keluarga. Dengan demikian, warga akhirnya pada umumnya hanya memperoleh secuil uang yang tak ternilai tersebut, juga merasakan dampak negatif dari aktiitas pertambangan di wilayah mereka seperti penurunan tingkat pendapatan karena terganggu oleh kepulan debu yang bertebaran di permukaan bumi sekitarnya hingga menembus wilayah pesisir pantai.

Dahulu, padi merupkaan tumpuan utama bagi sebagian besar warga untuk emenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Saat ini tidaklah demikian, mereka tertimpa malapetaka, karena volume air yang turun dahsyat. Hal ini buah dari penumbangan pohon-pohon raksasa dan galian tanah telah berlubang-lubang di sekitar kawasan hutan belantara. Kondisi air tanah yang sekonyong-konyong berubah warna juga menjadi pemandangan lainnya. Cepat atau lambat kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan warga sekitar lokasi pertambangan, baik dalam bentuk penyakit infeksi saluran pernafasan yang mengarah pada penyakit paru-paru.

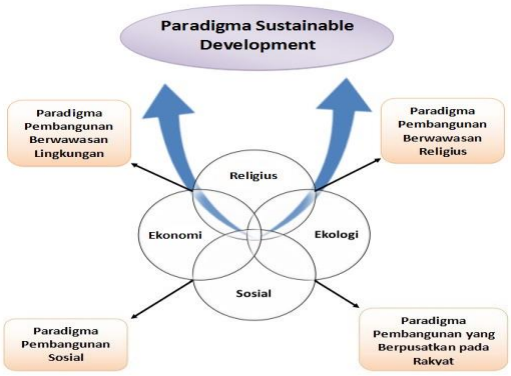
Akhirnya, harapan di satu sisi dan kenyataan pahit pada sisi lain yang tersenandung di lapangan ketika melakukan proses pengumpulan data adalah seolah terdengar secara serentak dan seakan saling berbenturan. Namun ironisnya, di balik deru debu dialektika pandangan warga masyarakat itu, kalangan industriawan akan terus menggebrak hingga boleh jadi terus melintasi batas hak penggunaan tanah galiannya yang telah digariskan kepadanya.

PENUTUP

Mengacu dan sekaligus mengutip diskursus pemikiran Peribadi (2017) yang tertuang dalam bukunya yang berjudul ”Resolusi Kemiskinan”, disebutkan bahwa paradigma pembangunan memang senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan permasalahannya. Tak pelak lagi, ketika terjadi krisis besar yang kemudian memaksa bangkitnya sebuah paradigma baru. Dalam konteks pertanian misalnya, menurut Salman (1992) bahwa Pemerintah Indonesia telah menggunakan paradigma liberal ketika terfokus kepada upaya mentransformasikan pertanian dari formasi *tradisional-substansial* menjadi *modern-kapitalistik* melalui kemajuan teknologi. Sementara kini, paradigma pembangunan semakin kompleks yang mencakup paradigma *Liberal*, *Marxis* dan *Post-struktural* sebagai multiparadigmatik.

Diakui bahwa Pemerintah Orde Baru telah berhasil menjawab spirit zaman kaum agraris dengan paradigma liberal, sehingga sukses gemilang menyandang predikat “swasembada pangan” ketika itu (Salman, 2012). Namun pada gilirannya, mengalami proses involusi pertanian dimaksud Geertz (1983; 1992),

karena mengabaikan paradigma Marxis untuk memantau hubungan sosial yang tidak seimbang antara petani pekerja dengan petani berdasi. Akibatnya, banyak petani di pedesaan Jawa yang kemudian beralih status menjadi *petani gurem* atau buruh-buruh tani. Dan tentu saja ke depan pembangunan pertanian terus menuai badai, jika belum ada kepedulian kita untuk menjawab spirit zaman kaum agraris, terutama dari sudut pandang paradigma *post-strukturalisme* yang perhatiannya pada faktor non struktural seperti pengetahuan, makna dan wacana untuk representasi diri.



Gambar 2. Diskursus Paradigma (*sustainable development)*

Sumber: dielaborasi dari Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Hikmat, 2014

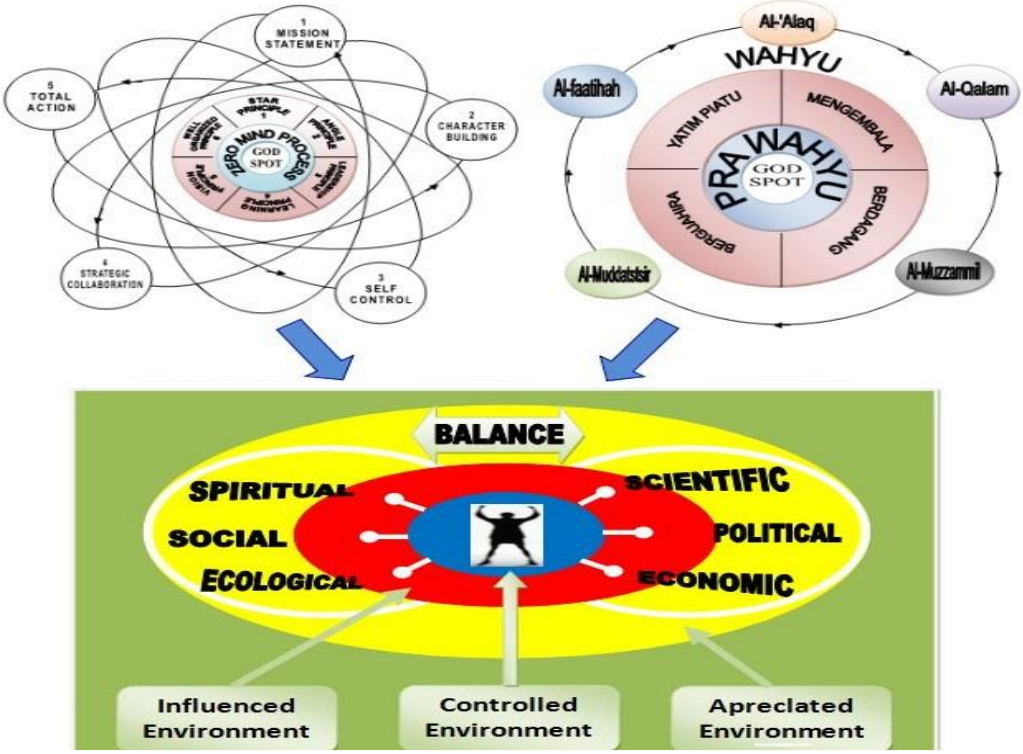
Menurut Hikmat (2014) bahwa pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Ketiga domain tersebut menjadi sumber terbentuknya paradigma: (1) pembangunan sosial (*social development*); (2) pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*); (3) pembangunan yang berpusat kepada rakyat (*people centered development*). Namun pada gilirannya, himpunan bagian yang saling beririsan dari ketiga domain tersebut, membuahkan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam konteks ini, penulis menambahkan nilai religius sebagai domain keempat untuk menyempurnakan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti terlihat dalam gambar 2.

Seiering dengan itu, menurut Mursito (2016) ketika pertama kali United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1990 mempublikasikan *Human Development Report* (HDR) yang berfokus pada pembangunan manusia dalam konteks non-fisik, terutama untuk membantu pemerintah yang rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan serta kesulitan untuk mengembangkan model pembangunan untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Karena itulah, maka Mabub ul Haq sang ekonom berkebangsaan Pakistan menulis sebuah buku yang berjudul: *Reflections on Human Development* (1995) yang dalamnya mengandung empat komponen mendasar, yakni: (1) kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara; (2) produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi; (3) pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi, dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial; dan (4) berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan: fisik, manusia, finansial, dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Tampaknya, sehebat dan sesempurna apapun teori dan konsep serta strategi yang dikembangkan untuk mensejahtrakan sebuah masyarakat, bangsa dan negara dengan berupaya mengimplementasikan paradigma sustainable deve-

lopment serta empat komponen esensial dimaksud Mabub ul Haq. Namun pada gilirannya menjadi sia-sia atau tidak mampu membuahkan hasil maksimal dan bahkan kini telah menjadi kenyataan pahit bagi masyarakat kontemporer dalam aneka dekosntruksi dan degradasi sosial yang terus menggelegar dengan berbagai implikasi sosialnya.

dalam gambar 3, diharapkan dapat melahirkan aktor dan aktris pembangunan yang kelak tampil menjadi manusia amanah serta senantiasa melaksanakan tugas dan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan sebaliknya, aktor pembangunan yang bermental menerabas, hipokrit dan enggan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud Koentjaraningrat dan Muhtar Lubis.



Gambar 3. Diskursus Paradigma Human Development Profetik

Sumber: Desi Fernanda, http://www.docdatabase.net/more-paradigma-paradigma-pembangunan-pusdiklat--1239365.html; Agustian, 2000; Peribadi, 2015.

Tentu saja hal itu terjadi adalah bukan semata-mata karena kelemahan konseptual pada be-berapa paradigma dimaksud, tetapi juga aktor dan aktris yang menggunakan paradigma pembangunan tersebut tidak memiliki mentalitas pembangunan yang etis, humanis dan intgralistik.

Akhirnya, proses sintetis antara paradigma *Human Development* dengan paradigma *ESQ Power* seperti terlihat

Akan tetapi adalah anak-anak bangsa yang memiliki etos kerja yang tinggi serta bermental baja dan berhati emas sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, karena telah melewati *training center* kehidupan yang berhasil menggenjot kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual serta kecerdasan kreativitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, G. A. (2000). *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual, ESQ, Emotional Spritual Quotient, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Jakarta: Arga.

Fisher, S. et al. (2001). *Mengelolah Konflik-Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak.* Jakarta: The British Council, Zed Books.

Geertz, C. (1983) *Involusi Pertanian*: *Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.* Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

Hikmat (2014). http://media.kemsos.go.id/images/556ARTIKEL_1_ANDALSOSPEM.pdf

Johnson, P. D. (1986). Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I. Jakarta: Gramedia.

Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol.* Jakarta: Grasindo.

Koodoh, E. E., Ahimsa-Putra, H. S., Setiadi (2018). The Involvement of Religious Leaders in Conflict Resolution Within Tolaki People of Konawe District, *Jurnal Al Albab Vol. 7 Number 1 June 2018.*

Mabub Ul Haq, 2016. http://ademujhiyat.blogspot.co.id/2016/05/paradigma-pembangunan-manusia.html

Moleong, J. L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Morissan. (2019). *Riset Kualitatif.* Jakarta: Prenada Media Group.

Muhadjir, N. (2011). *Metodologi Penelitian, Paradigma Positivisme Objektif, Fhenomenologi Interpretatif Logika Bahasa Platonis, Chomskyist, Hegelian dan Hermeneutik, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion-Set Theory & Struktural Equation Modeling dan Mixed, Rake Sarasin, Edisi VI Pengembangan*. Yokyakarta.

Mursito, H. (2016). *Human Development dan Kemiskinan*. http://www.kompasiana.com/ianmursito/human-development-dan-kemiskinan_54f3cf657455137a2b6c80b8

Peribadi, et al. (2013). *Industri Pertambangan Nikel dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi (Studi Kasus pada Warga Masyarakat di Sekitar Wilayah Industri Pertambangan Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan).* Kerjasama Dinas Pertambangan dan Enersi Pemda Konsel dengan Lembaga Penelitian Universitas Halu Oleo.

Peribadi. (2015). *Reconstruction of Participatory Paradigm Based on ESQ Power, A Strategy of Power Overcoming in Kendari City, South East Sulawesi*, Germany: Lambert Academic Publishing (LAP).

Peribadi. (2016). *Prahara Kehidupan Sosial Kaum Agraris: Sebuah Perspektif Fenomenologis*. Kendari: Unhalu Press.

Peribadi. (2017). *Resolusi Kemiskinan: Sebuah Strategi Community Development Berbasis Spiritual Profetik*, Sidoarjo: Jurusan Sosiologi FISIP UHO, Bekerjasama dengan OKSANA Publishing CV. KANAKA MEDIA.

Peribadi. (2019). *Multi-Metode dalam Pendekatan Kualitatif.* Materi Kuliah Metodologi Kuantitatif dan Kualitatif yang tidak dipublikasikan. Kendari: Sosiologi, FISIP, UHO.

Piliang, Amir, Yasraf, (1998). *Sebuah Dunia Yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Bandung: Mizan, Anggota IKAPI.

Ritzer, G. (2013). *Eksplorasi Dalam Teori Sosial: Dari Metateori sampai Rasionalisasi*, diterjemahkan oleh Astry Fajria dari buku Explorations in Social Theory, From Metatheorizing to Rationalization. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salman, D. (1996). *Gerakan Protes Petani dan Integrasi Pedesaan*, Prisma, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, No 7 – 1996. Jakarta: LP3ES.

Salman, D. (2012). *Pertanyaan Kaum Agraris Bagi Pembangunan Pertanian: Perlunya Pendasaran Multi Paradigmatik*, dalam Buku Gagasan, Pikiran dan Harapan Alumni Fakultas Pertanian, UNHAS Terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia. Makassar: PT. Kalola Printing.

Scott C. J. (1981). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.

Solihin A. (2010). *Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan*. https://ikanbijak.wordpress.com/2010/07/04/paradigma-baru-pembangunan-berkelanjutan/

Tjondronegoro, M. P. S. (1999). *Sosiologi Agraria, Kumpulan Tulisan Terpilih*. Penyunting: Sitorus, Felix dan Wiradi Gunawan, Bogor: Yayasan Akatiga, IPB Bogor.

Weber, M. (2012), *Teori Dasar Analisis Kebudayaan.* Diterjemahkan dari buku *Essays From Max Weber* oleh Abdul Qadir Shaleh. Jogjakarta: IRCiSoD.

Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial, Dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Defenisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.